Berantas Korupsi lewat Pendidikan

Jawa Pos, Sabtu, 19 Desember 2009

Oleh: Biyanto

JARINGAN Kerja Antikorupsi (JKAK) pernah membuat laporan bahwa hingga akhir November 2009, fenomena korupsi di Jatim mencapai 112 kasus. Itu tersebar di 28 kabupaten dan kota. Di antara 112 kasus korupsi tersebut, yang tertinggi terjadi di Surabaya, kemudian disusul Bondowoso, Kediri, Sidoarjo, dan Pasuruan. Ditambahkan bahwa kasus korupsi di daerah-daerah itu mayoritas dilakukan kalangan eksekutif, swasta, NGO, dan legislatif.

Di kalangan eksekutif, modus korupsi adalah suap, mark down dan mark up anggaran serta penyalahgunaan jabatan (Bisnis Indonesia, 9/12/2009). Laporan JKAK itu menunjukkan bahwa korupsi telah menyerang semua lembaga publik. Mulai yudikatif, eksekutif, hingga legislatif. Bahkan, lembaga swasta dan NGO pun terindikasi melakukan tindak korupsi.

Yang membuat masyarakat semakin heran adalah mengapa korupsi yang melibatkan pejabat publik di daerah terus meningkat. Padahal, sudah banyak lembaga antikorupsi yang dilahirkan sepanjang era reformasi. Salah satu lembaga pemberantasan korupsi yang dibentuk pemerintah dan menunjukkan kinerja paling garang adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Indikasinya, betapa banyak pejabat dan mantan pejabat yang sudah ditangkap, diadili, dan dijebloskan ke tahanan oleh KPK karena korupsi. Tetapi, ibarat penyakit kanker ganas, virus korupsi telah menyebar ke seluruh lembaga formal dan nonformal di negeri ini.

Masyarakat pun mengenal praktik korupsi yang telah disamarkan dengan banyak istilah. Misalnya, uang administrasi, uang tip, angpau, uang diam, uang bensin, uang pelicin, uang ketok, uang kopi, uang makan, uang pangkal, uang rokok, uang damai, uang di bawah meja, tahu sama tahu, dan uang lelah. Beberapa istilah tersebut sering dijumpai, terutama ketika ada orang yang sedang beperkara. Bahkan ketika ada anggota masyarakat mengurus keperluan di level RT, RW, kelurahan/desa, kecamatan, kabupaten/ kota, dan provinsi pun, beberapa istilah itu acapkali digunakan.

Pendek kata, budaya korupsi dalam berbagai bentuk dengan mudah bisa dijumpai setiap ada orang yang beperkara. Hebatnya, tidak hanya menyangkut urusan kehidupan/kelahiran, untuk urusan kematian pun seseorang masih harus menjumpai praktik korupsi. Sebagai bukti, untuk pengurusan akta kelahiran dan pemakaman, seseorang harus bernegosiasi dengan para pelaku tindak korupsi. Itu sekali lagi menunjukkan bahwa korupsi dalam berbagai bentuk dan tingkat telah mengakar kuat dalam kultur masyarakat. Karena itu, korupsi dalam bentuk yang samar dan telah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tumbuh subur di masyarakat tersebut harus diperhatikan aparat penegak hukum.

Sebagian orang menyatakan bahwa dalam kasus suap-menyuap sesungguhnya tidak ada pihak yang dirugikan. Yang disuap juga diuntungkan karena mendapatkan tambahan pendapatan di luar penghasilan resmi. Sementara itu, penyuap beruntung karena keinginannya tercapai. Sekilas pandangan tersebut memang benar. Tetapi, kalau diamati secara serius, sesungguhnya yang dirugikan adalah sistem. Alur pekerjaan dalam pemerintahan yang semestinya berjalan dalam sistem teratur dan terukur akan menjadi tidak beraturan karena tradisi suap-menyuap. Dengan bermodal uang, sebagian orang bisa memotong sistem seenaknya. Mereka ingin menempuh jalan pintas dan serbainstan, asal tujuan tercapai.

Jika kultur tersebut terus dibiarkan, dapat dikatakan bahwa hanya pemilik uang yang mendapatkan keistimewaan dalam segala urusan. Dengan uang, mereka bisa memainkan sistem sebagaimana yang diinginkan. Mereka yang tidak memiliki uang tidak memiliki akses sama sekali. Itulah awal kerusakan tata kelola pemerintahan yang semestinya dibangun atas dasar prinsip bersih dan baik (clean and good governance). Semua serba tidak pasti dan bergantung pada uang. Kalau itu yang terjadi, rakyat yang tidak memiliki modal jelas dirugikan.

Karena itu, budaya korupsi dalam berbagai bentuk sangat merugikan masyarakat. Apalagi, uang yang dikorupsi itu bersumber dari rakyat. Maka, pada konteks itulah, kita wajib menjadikan korupsi dan anak keturunannya sebagai musuh bersama. Hanya dengan jalan tersebut, roda pemerintahan berjalan dalam sistem yang benar dan rakyat menjadi semakin sejahtera.

Melalui Pendidikan

Usaha memberantas korupsi, harus disadari, merupakan investasi jangka panjang. Karena merupakan investasi jangka panjang, hasilnya pun tidak bisa dilihat dalam sekejap mata. Berkaitan dengan itulah, perlu dipikirkan langkah yang sistematis dan berkelanjutan untuk memberantas korupsi hingga ke akarnya.

Salah satu langkah yang bisa ditempuh adalah melibatkan lembaga-lembaga pendidikan, mulai tingkat dasar, menengah, hingga tinggi. Untuk pendidikan tingkat dasar dan menengah, usaha memberantas korupsi dilakukan dengan membangun kultur kejujuran yang melibatkan peserta didik, guru, dan pimpinan sekolah. Pada tahap awal, unsur-unsur di sekolah perlu diperkenalkan pada bentuk-bentuk perilaku yang dikategorikan korupsi. Langkah selanjutnya, mengenalkan bentuk-bentuk pemberantasan korupsi, mulai persoalan sederhana hingga kompleks. Misalnya, peserta didik diajak membangun kejujuran akademik sehingga tidak melakukan kecurangan dalam setiap ujian.

Dalam konteks tersebut, patut didukung ajakan gubernur Jatim kepada peserta didik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

SD, SMP, dan SMA untuk berperilaku jujur dan melakukan gerakan antikorupsi. Untuk merealisasikan program itu, Pemerintah Provinsi Jatim berencana membangun 380 kantin kejujuran di 38 kabupaten/kota. Asumsinya, akan ada 10 kantin kejujuran di setiap kabupaten/kota.

Selain melalui praktik berperilaku jujur, usaha menumbuhkan budaya antikorupsi bisa dilakukan melalui pembelajaran di kelas atau menyisipkan pada kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Melalui pembelajaran itu, peserta didik diajak menganalisis persoalan yang menghambat usaha pemberantasan korupsi sekaligus merumuskan solusinya.

Langkah serupa juga bisa dilakukan di pendidikan tinggi. Mahasiswa, dosen, tenaga administrasi, dan pimpinan perguruan tinggi didorong untuk turut membangun integritas publik dan budaya antikorupsi. Melalui mata kuliah yang relevan, berbagai kegiatan kemahasiswaan, dan kebijakan pimpinan, penanaman nilai-nilai integritas publik dan antikorupsi diharapkan dilakukan dengan efektif. Dengan demikian, pelibatan lembaga pendidikan mutlak diperlukan untuk membangun generasi masa depan yang memiliki integritas moral dan akademis.

Ada dua alasan penting mengapa lembaga pendidikan perlu dilibatkan dalam pemberantasan korupsi. Pertama, lembaga pendidikan memiliki seperangkat pengetahuan (knowledge) yang dapat mencerahkan lembaga-lembaga publik agar memiliki integritas dan budaya antikorupsi. Para pelayan di lembaga-lembaga publik perlu diberi penjelasan tentang perilaku yang bisa dikategorikan korupsi. Dalam hal ini, harus diakui secara jujur bahwa di lembaga-lembaga publik tidak tersedia sumber daya yang memadai untuk dijadikan sebagai referensi dalam menjelaskan tindakan korupsi. Realita menunjukkan bahwa dalam setiap terjadi polemik kasus, terutama yang berkaitan dengan tindak korupsi, lembaga yudikatif selalu meminta pandangan ahli dari perguruan tinggi. Itu berarti lembaga pendidikan sesungguhnya memiliki modal berupa seperangkat pengetahuan yang bisa digunakan untuk memberantas korupsi.

Kedua, lembaga pendidikan memiliki jaringan (network) yang luar biasa mulai kota besar hingga pedesaan terpencil sekalipun. Dalam konteks itu, program pemberantasan korupsi melalui lembaga pendidikan akan menjadi gerakan sosial yang dahsyat. Jumlah lembaga pendidikan yang mencapai ratusan ribu dengan komponen di dalamnya, mulai peserta didik, mahasiswa, guru, dosen, tenaga administrasi, dan pimpinan, pasti akan menjadi kekuatan luar biasa untuk memberantas korupsi. Jika usaha pemberantasan korupsi melalui pendidikan itu dilakukan secara masif, efektif, dan berkelanjutan, integritas lembaga-lembaga publik dan budaya antikorupsi tentu bisa diwujudkan. Lembaga pendidikan pun dipastikan akan memproduksi individu yang berintegritas baik dan mampu memberantas korupsi. Bukankah lembaga-lembaga publik yang ada sekarang akan diisi oleh anak-anak yang kini sedang belajar di bangku sekolah dan perguruan tinggi? (*/dos)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id